

**RESPONSIVITAS PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM MENATA
PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN PERINTIS KEMEDERKAAN JATI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



Oleh:
Okky Chairanda
1210832006

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Aidinil Zetra, M.A
2. Dewi Anggraini, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Andalas

2019

ABSTRAK

Okky Chairanda. 1210832006. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Judul Skripsi; “Responsivitas Pemerintah Kota Padang Dalam Menata Pedagang Kaki Lima di Jalan Perintis Kemerdekaan Jati.”

Pemerintah dapat dikatakan bertanggung jawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas (daya tanggap) yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, mereka cepat memahami apa yang menjadi tuntutan publik, dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya. Pemerintah diharuskan mempunyai daya tanggap yang tinggi untuk dapat menyelesaikan permasalahan, memenuhi semua kebutuhan dan semua aspirasi para pedagang kaki lima (PKL).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya responsivitas Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menata Pedagang Kaki Lima di Wilayah Jalan Jati Kota Padang. Metode penelitian kualitatif dipilih karena penelitian kualitatif berguna untuk mengungkap proses kejadian secara mendetail sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh terhadap realitas sosial.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penataan PKL dikaitkan dengan upaya-upaya untuk menata lokasi berdagang PKL, perizinan untuk dapat berdagang di lokasi tersebut, aktivitas perdagangan, dan aktivitas pengendalian berjalannya perdagangan PKL, dan evaluasi PKL. Pemberdayaan PKL dikaitkan dengan upaya-upaya yang wajib atau dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memberdayakan PKL, seperti peningkatan kemampuan berusaha, akses permodalan, pembinaan organisasi, pengembangan dan pembinaan koperasi PKL, peningkatan forum komunikasi antara pedagang dan pemerintah daerah, peningkatan produksi dan promosi, bimbingan teknis, dan/atau kebijakan-kebijakan lain yang diperlukan. Penataan dan pemberdayaan PKL memerlukan peran masyarakat, baik dalam bentuk pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, maupun penyampaian informasi, laporan, dan/atau pengaduan adanya pelanggaran dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

Kata Kunci: Responsivitas, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Okky Chairanda. 1210832006. Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Thesis Title; “The Government Responsiveness of Padang in Managing Street Vendors in Perintis Kemerdekaan Street Jati.”

The government could be said to be responsible if they considered to be of responsiveness (the responsiveness of) to address probably the trouble as to those matters in that has been a problem, the needs of, may complaints may complaints and the aspirations of the people they represent, they are fast a grasp of what is become the demands of the position the public which had bought, and will try to as maximum as possible them a book from heaven. The government has the magnitude of being a responsive provider of that subscribers have to have a high affinity for to be able to resolving problems the schools, meeting all demands and all traders aspiration a food of five (street vendors).

The purpose of this research is to explain the factors that the causes of the low local government responsiveness of Padang in managing street vendors on jalan jati padang areas. Qualitative research was conducted chosen because the qualitative study useful to express the process of the incident in detail so that known the dynamics of a social reality and interplay against social reality.

The results of the study concluded that the arrangement street vendors associated with efforts to manage the trade street vendors, licensing to be trading in the location, commercial activity, and activity control of the trade street vendors, and evaluation street vendors. Empowerment street vendors associated with or efforts must be made by local governments in empower street vendors, as increased capacity to, access to capital, coaching organization, development and coaching cooperatives street vendors, the communication forum some traders and local governments, the increase and promotion, technically, and/or other necessary policies. Management and street vendors need empowerment role of the community, in the form of social supervision, giving advice, opinion, proposals, mind, and delivery of information, reports, and/or claims any violation in arranging and empowerment street vendors.

Keywords: Responsiveness, Food of Five Street Vendors